

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama kepada :

1. Nama Sekolah : SMP Mulyo Budiono Islamic Boarding School (MBI BS) Pangkalpinang
2. Alamat Sekolah :
Jalan : Batu Nirwana II Rt.06 Rw.01
Kelurahan : Semabung Lama
Kecamatan : Bukit Intan
Kota : Pangkalpinang
Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung

KEDUA

: Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Pangkalpinang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak idealnya sejak umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan idealnya 15 (lima belas) tahun yang mengimplementasikan konsep pendidikan Islam berdasarkan Al Qur'an dan As Sunnah yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan dengan konsep akumulasi dari proses pembudayaan, pewarisan, dan pengembangan ajaran agama Islam untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak mendapatkan pendidikan yang tercerahkan dan memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

KETIGA

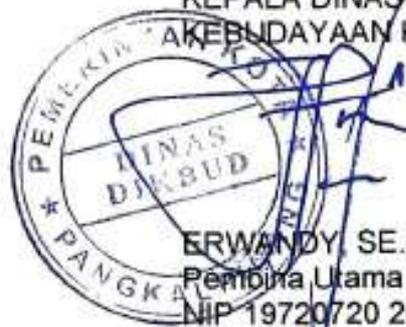
: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan 4 Desember 2025 dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan perubahan aturan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 4 Desember 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA PANGKALPIANG,



ERWANDY, SE.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720720 200604 1 004

Tembusan :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
2. Dirjen Dikdasmen Kemendikbud di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Ketua DPRD Kota Pangkalpinang di Pangkalpinang;
5. Inspektur Kota Pangkalpinang di Pangkalpinang.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Operasional, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 15).
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;
14. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Rasakunda Girimaya Pangkalpinang, Telp. (0717) 421163, (0717) 421285
Fax (0717) 421163, Website : <http://www.dinpendikpkp.go.id>
E-mail : info@dinpendikpkp.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 150/KEP/DIKBUD/XII/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR
SMP MULYO BUDIONO ISLAMIC BOARDING SCHOOL (MBI BS) PANGKALPINANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PANGKALPINANG

- Membaca** : 1 Surat Kepala SMP Mulyo Budiono Islamic Boarding School (MBI BS) Pangkalpinang Nomor:031/DIKBUDPGK/SMPMBI.BS/XI2023 tanggal 13 November 2023 tentang Permohonan Izin Operasional SMP Mulyo Budiono Islamic Boarding School (MBI BS) Pangkalpinang
- 2 Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 27/I2B.F4e/1986 tanggal 26 Mei 1986 tentang Persetujuan untuk mendirikan sekolah swasta.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan mutu sumber daya manusia yang unggul, cerdas dan berdaya saing global, perlu memberikan izin Operasional SMP Mulyo Budiono Islamic Boarding School (MBI BS) Pangkalpinang
- b. bahwa proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh sekolah telah sesuai dengan persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);